

KORAN DIGITAL

radar.
MEDIA

RADAR SAMARINDA

EDISI SABTU
9 SEP 2023

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM



INI 5 NAMA USULAN BAKAL CALON PJ GUBERNUR



MUDA
BERAHLAK
AMANAH
DINAMIS



ARIE
WIBOWO

CALEG DPRD KOTA SAMARINDA
DAPIL 5 SAMARINDA UTARA - SUNGAI PINANG



Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud

INI 5 NAMA USULAN BAKAL CALON PJ GUBERNUR

SAMARINDA - DPRD Kaltim telah memutuskan untuk membawa lima nama bakal calon Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim ke Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri). Hal ini terkait untuk mengisi kekosongan jabatan pasca berakhirnya masa jabatan Isran Noor pada Oktober mendatang.

Meski yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bahwa DPRD dapat dapat mengusulkan tiga nama untuk menjadi Pj Gubernur. Akan tetapi yang dilakukan DPRD Kaltim justru membawa semua nama-nama usulan semua fraksi di Karang Paci.

Ketua DPRD Kaltim Hasanud-

din Mas'ud menerangkan, hal ini dilakukan untuk mengakomodir setiap usulan fraksi. Lagipula menurutnya, tak sedikit Kepala Daerah yang ditetapkan oleh Kemendagri yang merupakan "Orang Pusat".

"Kita kirim tiga pun belum tentu disetujui, makanya kita kirim semua. Jadi tidak ada aspirasi yang tidak diakomodir. Semua sesuai, dan ada penjelasannya. Adapun pembobotan dan matriksnya ada keterangan di situ," jelasnya kepada awal media, Jumat (8/9/2023).

Politisi Golkar ini merasa pesimis usulan dari DPRD Kaltim dapat diterima dan dipilih oleh Presiden melalui Kemendagri. Pasalnya, melihat sejumlah Pj yang dilantik, merupakan tokoh-tokoh yang memang di level pemerintahan pusat.

"Tetap saja dari kemarin-kemarin semua dari pusat. Kalau

pun ada yang terpilih dari sekda itu sudah dititip di situ," tegasnya.

"Saya lihat agak banci sih aturan itu, karena kita enggak ada orang sebagai asesor, tetap kembali ke pusat, mendagri tapi dari presiden," sambungnya.

Meski demikian Hasan tak membeberkan nama-nama berdasar ranking pembobotan. Yang jelas lima nama yang menjadi usulan DPRD Kaltim yakni, Rektor Universitas Mulawarman Abdunnur, Deputy Bidang Sosial dan Budaya Badan Otorita IKN, Alimudin, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag H Kamaruddin Amin, dan Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik serta Sri Wahyuni Sekdraprov Kaltim.

"Kita mengirimkan ke lima nama itu dengan ranking dan abjad nama, nanti mereka yang lihat," tutupnya.

Pewarta : Andi Desky
Editor : Nicha Ratnasari

PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

DINAS KESEHATAN

<http://dinkes.kaltimprov.go.id>Dra. Sri Wahyuni M.PP
SEKDA PROV. KALTIMDr. H. Ir. Isran Noor, M.Si
GUBERNUR KALTIMH. Hadi Mulyadi, S.Si, M.Si
WAKIL GUBERNUR KALTIMdr. H. Jaya Muallim, Sp.KJ, M.Kes, MARS
GUBERNUR KALTIM

Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinkes Kaltim, Dr Ivan Hariyadi.

DINKES KALTIM IMBAU ORANG TUA IMUNISASIKAN ANAK

SAMARINDA - Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur (Dinkes Kaltim) mengajak seluruh orang tua agar lebih memperhatikan serta menjaga kesehatan anak mereka. Salah satu cara agar kesehatan anak dapat terjaga yakni dengan melakukan imunisasi.

Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinkes Kaltim, Dr Ivan Hariyadi mengatakan imunisasi dapat dilakukan semasa anak masih bayi hingga sudah Sekolah Dasar (SD).

Hal ini dinilainya sangat penting, sebab jika anak tak mendapat imunisasi maka daya tahan tubuhnya akan lemah. Sehingga akibatnya anak akan lebih mudah sakit.

"Kami berharap masyarakat bisa memanfaatkan imunisasi ini untuk menjaga kesehatan anak-anak mereka," ucap Dr Ivan saat dikonfirmasi Kamis (7/9/2023).

Kata Dr Ivan, saat ini masih saja ada orang

tua yang belum melakukan imunisasi terhadap anak mereka dengan berbagai alasan. Padahal, imunisasi merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mencegah anak-anak menderita penyakit yang bisa dicegah dengan vaksin.

"Ini merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mencegah anak-anak menderita penyakit yang bisa dicegah dengan vaksin. Saat ini tingkat cakupan imunisasi di Kaltim sudah cukup bagus. Kami juga telah memperkenalkan imunisasi-imunisasi baru seperti rotavirus, PCV dan HPV," ungkapnya.

Diharapkan para orang tua dapat melakukan Imunisasi kepada anak mereka, karena imunisasi merupakan langkah pencegahan yang paling efektif.

"Imunisasi ini merupakan program pemerintah, sayang kalau tidak dimanfaatkan masyarakat," pungkasnya. **(adv/vic)**



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

DINAS KESEHATAN



GERMAS
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat



<http://dinkes.kaltimprov.go.id>

Dra. Sri Wahyuni M.PP
SEKDA PROV. KALTIM

Dr. H. Ir. Isran Noor, M.Si
GUBERNUR KALTIM

H. Hadi Mulyadi, S.Si, M.Si
WAKIL GUBERNUR KALTIM

dr. H. Jaya Muallimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS
GUBERNUR KALTIM



Dr Jaya
Muallimin
saat memi-
mpin rapat
Rancangan
Pergub
Penanggu-
langan TBC.

TEKAN ANGKA PENDERITA TBC, DINKES KALTIM GELAR RAPAT BAHAS RANCANGAN PERGUB

SAMARINDA - Guna menanggulangi penyakit Tuberkulosis (TBC), Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur (Dinkes Kaltim) menggelar rapat membahas rancangan peraturan Gubernur (Pergub) terkait penanggulangan TBC. Rapat ini digelar di Ruang Rapat Tepian I Kantor Gubernur Kaltim pada Kamis (7/9/2023).

Rapat ini digelar sebab TBC masih menjadi masalah kesehatan yang signifikan di Indonesia, termasuk di Provinsi Kaltim.

Kepala Dinkes Kaltim, Dr Jaya Muallimin mengatakan bahwa berdasarkan laporan Global TB tahun 2022, Indonesia menempati peringkat kedua di dunia dalam hal jumlah kasus TBC tertinggi, setelah India. Pemerintah telah menegaskan komitmennya terhadap eliminasi TBC melalui "Gerakan Bersama Menuju Eliminasi TBC tahun 2030" dan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 mengenai Penanggulangan Tuberkulosis.

Kata Dr Jaya, Rancangan Per-

gub yang saat ini tengah disusun pihaknya ini bertujuan untuk mempercepat eliminasi Tuberkulosis di Kaltim sesuai dengan target nasional yakni pada tahun 2030.

"Kita harapkan dengan disusunya pergub penanggulangan tuberkulosis ini agar dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat sehingga kasus Tuberkulosis bisa ditangani dan teratasi bahkan lebih cepat dari target nasional yaitu pada tahun 2030," ucap dr Jaya saat diwawancara usai rapat.

Ia menyebutkan, pada tahun 2021 tercatat sebanyak 5.010 kasus TBC di Kaltim. Akan tetapi, data per Oktober 2022 menunjukkan bahwa kasus TBC di Kaltim masih rendah, yaitu hanya mencapai 74% dari tahun sebelumnya.

Upaya mempercepat eliminasi Tuberkulosis di Kaltim pada tahun 2030 merujuk pada beberapa indikator diantaranya penurunan angka kejadian (incident rate) TBS menjadi 65/100.000 penduduk dan penurunan angka

kematian akibat TBC menjadi 6/100.000 penduduk.

"Pada tahun 2022, tercatat 42 kasus TBC RO, yang kemudian meningkat menjadi 62 kasus. Tingkat keberhasilan pengobatan TBC pada tahun 2022 masih rendah, yaitu sebesar 44 persen," ungkapnya.

Untuk menekan angka penderita TBC di Kaltim, Directly Observed Treatment Strategy (DOTS) menjadi strategi dalam penanggulangan Tuberkulosis yang terdiri dari 5 strategi. Yaitu komitmen dalam mendukung pengobatan TBC sampai tuntas, pendiagnosaan TBC melalui pemeriksaan bakteriologis, pendampingan Pengawas Menelan Obat (PMO) untuk menjamin kesembuhan, dan penyediaan obat TBC yang terjamin baik kualitas maupun kuantitas, serta pencatatan dan pelaporan kasus TBC yang baik.

"Dengan rancangan Pergub ini diharapkan dapat menekan angka penderita TBC di Kaltim," pungkasnya. **(adv/vic)**



SEMAKIN MELUAS, KARHUTLA DI PPU

HANGUSKAN 90 HEKTARE LAHAN



**DPMD PPU DORONG
PEMBENTUKAN PERBUP DESTANA**



Kepala DPMD PPU, Pang Irawan.

DPMD PPU DORONG PEMBENTUKAN PERBUP DESTANA

PPU - Upaya penanganan bencana terus diupayakan Pemkab Paser Utara (PPU). Khususnya pengendalian bencana hingga ke tingkatan desa seiring meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Benuo Taka.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) PPU tengah menyiapkan payung hukum berupa peraturan bupati (perbup) menyangkut Desa Tangguh Bencana (Destana). Regulasi ini menjadi dasar desa untuk membentuk relawan bencana dan penggunaan anggaran APBDes.

"Destana sebagai upaya mengurangi risiko dan menanggulangi bencana secara cepat dan tepat," kata Kepala DPMD PPU, Pang Irawan, Jumat (8/9/2023).

Selain itu, para relawan bencana bertugas melakukan sosialisasi kepada warga desa. Sekaligus memberikan pelatihan mengenai cara-cara penanganan bencana.

Keberadaan Destana juga diharapkan bisa semakin menekan potensi terjadinya bencana. Terutama di wilayah yang rawan banjir, serta kebakaran dan tanah longsor, termasuk karhutla.

"Saat ini, sedang menyusun peraturan bupati atau peraturan kepala daerah menyangkut Destana di setiap desa," terangnya.

Usulan adanya regulasi ini pula, tercantum sebagai salah satu prioritas penggunaan dana desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Untuk pembentukan dan operasional.

"Dalam prioritas penggunaan dana desa dari APBD itu salah satunya untuk Destana," tambahnya.

Pun, DPMD PPU nantinya dapat memastikan Destana bakal masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Destana merupakan program setiap desa harus memiliki kemampuan mandiri untuk

beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta dengan segera dapat mengetahui kerugian dampak bencana.

"Sejumlah desa di PPU telah menindaklanjuti pembentukan Destana dengan berisikan relawan tanggap bencana," sebut Pang Irawan.

kadar Informasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim bersama BPBD PPU pada Juni lalu melaksanakan sosialisasi pembentukan. Hal ini sebagai upaya Pemprov Kaltim dalam pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM).

Sesuai data, saat ini di PPU telah ada 12 kelurahan/desa yang telah membentuk Destana. Meliputi Desa Bukit Subur, Desa Rintik, Desa Sumber Sari, Desa Bangun Mulya, Desa Sebakung Jaya, Desa Karang Jinawi, Desa Babulu Laut, Desa Api-Api, Desa Sesulu, Kelurahan Riko, Kelurahan Sepaku, dan Kelurahan Saloloang. **(SBK)**



Pemadaman karhutla di Kelurahan Gunung Seteleng, Jumat (8/9/2023). (Pusdalops BPBD PPU for MediaKaltimGroup)

SEMAKIN MELUAS, KARHUTLA DI PPU SUDAH HANGUSKAN 90 HEKTARE LAHAN

PPU - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Penajam Paser Utara (PPU) terus meluas dan berpotensi terus terjadi hingga beberapa bulan ke depan.

Hingga saat ini, luas lahan dan hutan yang terbakar telah mencapai 90 hektare yang tercatat sejak Juli 2023. Lokasi karhutla terluas terjadi di Kecamatan Penajam, menyusul di Kecamatan Waru dan Babulu.

"Berdasarkan data Kami, sudah ada lebih kurang 90 hektare karhutla terjadi sejak Juli, termasuk luas lahan yang hari ini kami tangani," ujar Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU, Budi Santoso, Jumat (8/9/2023).

Untuk kejadian hari ini, ada 5 kasus karhutla. Yakni di RT 06, Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam. Terjadi pada sekitar pukul 10.50 Wita.

Kejadian kedua pada pukul 11.52 Wita Karhutla terjadi di RT 08, Kelurahan Sungai Parit. Kemudian Karhutla ketiga pada pukul 16.00 Wita terjadi di Desa Sri Raharja Kecamatan Babulu.

Lagi di 16.30 Wita di Jalan Bunga Bayam, Kelurahan Gunung Seteleng.

Lalu, laporan karhutla yang keempat pada pukul 18.01 Wita dengan lokasi lahan yang terbakar di Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam.

"Hingga kini terdapat 38 kali kejadian laporan yang kami terima. Semua personel bersama tim gabungan dari TNI, Polri, unsur pemerintah daerah lainnya dan dibantu oleh masyarakat tetap semangat," jelas Budi.

Ia memprediksi, luasan lahan dan hutan yang terbakar kemungkinan kian bertambah selama musim kemarau ini. Kebakaran lahan bisa terjadi di mana saja di Kabupaten PPU, karena semua lahan itu rawan terbakar.

Berdasarkan rilis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dampak musim El Nino saat ini waktunya masih panjang. Artinya musim kemarau masih lama, dan diperkirakan dapat terjadi hingga awal November.

"Sehingga Saya meminta agar masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan karena material yang ada di lahan warga itu sudah sangat kering sehingga sangat mudah terbakar," pungkasnya. **(SBK)**



SENGKETA LAHAN TAMBANG DI LOA JANAN, DIHALANGI ORMAS, APARAT POLRES KUKAR MUNDUR



**20 Tim Siap Adu Skill di Turnamen
Sepak Bola Bupati Cup 2023**



Pertemuan antara aparat pemerintah dengan PT Indo Perkasa dan PT Etam Manunggal Jaya pada Jumat, 8 September 2023.

SENGKETA LAHAN TAMBANG DI LOA JANAN, DIHALANGI ORMAS, APARAT POLRES KUKAR MUNDUR

KUKAR - Akibat terhalang oleh Organisasi Masyarakat (Ormas), aparat Polres Kukar gagal menyelesaikan sengketa lahan antara dua perusahaan pertambangan di Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Padahal Ormas yang menghambat tindakan aparat tersebut mendukung perusahaan yang tidak memiliki legalitas kepemilikan tanah yang sah.

"Kami mempertimbangkan agar situasi tetap kondusif sambil memungkinkan kedua belah pihak untuk bertemu dan melakukan mediasi," ujar AKP Dharwis, yang didampingi oleh Kapolsek Loa Janan, AKP Andi, pada Jumat, 8 September 2023, sore di lokasi kejadian.

Sengketa antara PT Etam Manunggal Jaya dan perusahaan asing PT Indo Perkasa sudah berlangsung sekitar satu bulan, dan ini telah mengakibatkan penutupan jalur hauling yang dilakukan oleh Indo Perkasa. Pada Jumat (8/9) sore, pemerintah melalui aparat Kecamatan Loa Janan, Pemerintah Desa, Polsek, dan Polres mendatangi lokasi penutupan jalan tersebut.

Kehadiran pemerintah di lapangan bertujuan untuk memediasi dan memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak mengenai surat legalitas kepemilikan tanah mereka. "Kami ingin menjelaskan bahwa lahan ini benar-benar milik PT Etam Manunggal Jaya, yang telah memiliki Surat Keterangan

Penguasaan Tanah (SKPT) yang sah sejak tahun 2000 dan 2001," ujar Kasi Pemerintahan Kecamatan Loa Janan, Nazrul Halim.

Halim menjelaskan bahwa legalitas tanah yang dimiliki oleh PT Indo Perkasa, yang dibeli dari Hermansyah, telah dicabut oleh pihak kecamatan karena terdapat banyak ketidaksesuaian, seperti asal usul pembelian, letak, dan posisi batas tanah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. "Oleh karena itu, SKPT yang diterbitkan pada tahun 2018 dicabut," ujar Halim.

Oleh karena itu, jalur hauling yang telah ditutup oleh Indo Perkasa harus segera dibuka. Sebelumnya, Dharwis menjelaskan bahwa pembukaan jalur hauling ini merupakan solusi awal agar kedua perusahaan dapat melanjutkan aktivitas mereka sambil melakukan mediasi atau proses hukum yang sesuai.

Namun, pihak Indo Perkasa menolak penjelasan tersebut. Mereka diwakili oleh pimpinan organisasi masyarakat Laskar Borneo Nusantara, Samsul, yang meminta agar jalur hauling tersebut tetap tertutup. "Saya hanya menjalankan perintah ketua kami. Silakan mencari solusi yang baik-baik," ujar Samsul.

Menanggapi hal ini, pihak Polres Kukar akhirnya memutuskan untuk mundur. Saat berada di lokasi perselisihan, terlihat Ormas yang berjaga di sekitar PT Indo Perkasa yang telah menumpukkan tanah untuk menu-

tup akses jalan milik Etam Manunggal Jaya. Sayangnya, ketika polisi mencoba membuka penutup jalan tersebut, mereka dihentikan oleh Ormas. "Seharusnya aparat bisa tegas, karena kami juga ingin keadilan di mana kami adalah pemilik tanah yang sah," ujar Hermanto, Direktur Etam Manunggal Jaya.

Kepala Desa Loa Janan, Abdul Rasyid, juga mengambil sikap dalam masalah ini. "Saya tidak peduli dengan permasalahan kalian. Yang saya lihat di sini adalah masalah warga saya yang akan kehilangan mata pencaharian jika jalan ini ditutup. Jadi, tolong tinggalkan ego masing-masing," ujarnya.

Lebih lanjut, Abdul Rasyid menjelaskan bahwa ia siap membantu mediasi antara kedua belah pihak. Bahkan, jika dalam waktu 7 hari jalur jalan tidak dibuka, ia akan mengirim surat kepada kedua perusahaan untuk memberitahu bahwa jalur tersebut akan dibuka secara paksa. "Saya siap untuk mediasi. Saya juga siap untuk membuka jalan ini sendiri. Jika ada masalah hukum, silakan kalian selesaikan sendiri. Saya tidak akan memihak kepada salah satu dari kalian. Yang saya pikirkan adalah warga saya yang terdampak konflik ini," jelasnya.

Rasyid menyatakan niatnya untuk mengirim surat kepada kedua perusahaan tersebut, memberi tahu bahwa jalur tersebut akan segera dibuka kembali. **(Bom)**



Tendangan bola pertama yang dilakukan oleh Bupati Kukar, Edi Damansyah sebagai penanda dimulainya Bupati Cup 2023 (Ady/Radar Kukar)

20 Tim Siap Adu Skill di Turnamen Sepak Bola Bupati Cup 2023

TENGGARONG- Setelah tertunda selama 4 tahun lantaran pandemi COVID 19, akhirnya turnamen sepak bola Bupati Cup 2023, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali digelar.

Ditandai dengan penendangan bola pertama oleh Bupati Kukar, Edi Damansyah. Sebanyak 20 tim sepak bola putra yang mewakili masing-masing kecamatan saling beradu untuk keluar menjadi juara.

Dalam gelaran Bupati Cup tahun ini, tidak hanya mempertandingkan tim yang mewakili masing-masing kecamatan. Tapi juga ada pertandingan antar tim sepak bola wanita dan usia dini. Setidaknya ada 600 pemain, pelatih, dan official yang ikut terlibat dalam kompetisi ini.

Dalam kesempatan ini, Bupati Kukar, Edi Damansyah turut menyampaikan apresiasi dan penghargaan tinggi kepada panitia pelaksana, serta seluruh pihak yang terlibat dalam sukses terselenggaranya turnamen ini.

"Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki komitmen kuat dalam mendukung setiap upaya peningkatan prestasi olahraga di daerah ini," kata Edi dalam sambutannya saat membuka secara langsung turnamen sepak bola Bupati Cup 2023 di

Stadion Rondong Demang, Jumat (8/9/2023).

Ajang sepak bola ini, kata Edi, merupakan salah satu langkah positif yang harus didukung agar gairah olahraga di Kukar terus tumbuh dan berkembang.

"Saya tegaskan dalam setiap event olahraga, tidak ada lagi atlet dari luar. Kita harus memberdayakan atlet lokal Kukar, kita punya potensi atlet yang melimpah. Bahkan sudah ada yang berprestasi di taraf internasional," sambungnya.

Dia juga turut mendorong jajaran Dispora Kukar, KONI Kukar, ASKAB PSSI Kukar agar melakukan pembinaan intensif dan menggali talenta berbakat putra daerah.

Terakhir Edi juga berpesan, agar semua tim harus lebih bersemangat dalam kompetisi olahraga yang sportif, bersaing secara sehat, serta menampilkan performa terbaik.

"Mari kita jadikan ajang pertandingan ini sebagai momentum solidaritas untuk saling dukung dan bersatu kita jauhi potensi konflik dan kericuhan yang merugikan," tegasnya.

Sebagai informasi, turnamen sepak bola Bupati Cup merupakan agenda tahunan yang rutin terselenggara pada setiap tahunnya. Namun, ajang bergeng-

si ini sempat terhenti selama empat tahun lantaran pandemi Covid-19, hingga akhirnya kembali terselenggara di tahun 2023.

Untuk menjamin keselamatan pra atlet yang bertanding, Dispora Kukar pun membekali semua unsur yang terlibat dalam turnamen ini dengan BPJS Ketenagakerjaan. Ini merupakan bentuk nyata kepedulian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar terhadap masa depan bibit olahraga Kukar di era Edi-Rendi.

"Semangat pembinaan tingkat desa meninhhkat ke kecamatan, kemudian digelar kompetisi di tingkat kabupaten. Ini tidak terlepas dari kegiatan pembinaan. Kalau pembinaan baik hasilnya baik," ucap Ketua Panitia Turnamen Sepak Bola Bupati Cup 2023, Zukran.

Seluruh pertandingan ini dilaksanakan di tiga lokasi. Yakni, Stadion Rondong Demang Tenggarong, Stadion Aji Imbut Tenggarong Seberang, dan Lapangan Mini Soccer untuk usia dini.

"Kompetisi sepak bola ini resmi dimulai hari ini sampai 30 September 2023. Akhirnya akan dilaksanakan saat penutupan era untuk memperebutkan piala bergilir Bupati Kukar," tandasnya.

Penulis : Ady Wahyud

Editor : Nicha Ratnasari



Kadis PMD Kukar, Arianto (Ady/Rasar Kukar)

PASTIKAN PROGRAM TERANG KAMPUNGKU TUNTAS, PEMKAB KUCURKAN 32,5 MILIAR

TENGGARONG - Untuk realisasikan Program Terang Kampungku, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) alirkan dana sebesar Rp 32,5 miliar pada tahun 2023 ini.

Anggaran sebesar itu sengaja digelontorkan oleh Pemkab Kukar, demi memberikan layanan listrik dasar pada seluruh masyarakat Kukar selama 24 jam.

Kepala DPMD Kukar, Arianto menjelaskan, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar tahun 2021-2026, setidaknya ada 17 titik lokasi yang belum dialiri listrik selama 24 jam.

Lokasi inilah yang kemudian secara bertahap terus dilakukan realisasi pemenuhan kebutuhan listrik dasar. Baik dengan menggunakan jaringan listrik PLN ataupun dengan menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal.

"Dari target itu, Alhamdulillah yang sudah terpenuhi dari 2021-2023 ini ada yang pakai PLN dan PLTS Komunal. Karena tidak memungkinkan pakai jaringan PLN itu kebijakannya harus pakai

PLTS Komunal," kata Arianto, Jumat (8/9/2023).

Sepanjang tahun 2022, Arianto mengatakan jaringan listrik PLN sudah terpasang Desa Muhuran, Sebelimbingan, Teluk Muda, Dusun Pendamana di Desa Tuana Tuha dan Tanjung Batu Harapan.

Sedangkan untuk PLTS Komunal sendiri pada tahun lalu sukses menerangi Desa Tunjungan, Menamang Kiri dan Menamang Kanan.

"Kalau kita evaluasi, yang belum kita laksanakan itu hanya di Desa Liang Buaya sama Lamin Puluk dan Lamin Telihan. Desa Lamin Puluk dan Telihan itu akan dibangun PLTS di awal 2024 karena jaringan PLN tidak bisa menjangkau di sana," tambahnya.

Kemudian pada tahun 2023 ini, DPMD Kukar akan membangun PLTS komunal di dua titik, yakni di Desa Kupang Baru yang prosesnya sudah 50 persen dan Dusun Nangka Bona, Desa Tunjungan yang sudah selesai dan sudah diresmikan melalui APBD murni. Dan masih akan ditambah di beberapa titik pada APBD-P

tahun 2023.

"Untuk anggaran tahun 2023 total Rp 32,5 miliar, untuk murni itu Rp 12,5 miliar untuk dua titik. Untuk perubahan itu ada dua kurang lebih dari Rp 20 miliar," sebut Arianto.

Arianto menambahkan, sampai saat ini proses pengerjaannya belum ada kendala. Karena pengerjaannya langsung diserahkan dalam bentuk program BKPD atau Bantuan Keuangan Kepala Desa.

"Nanti mereka yang mengerjakan, dan mereka yang akan mencari mitra penyedia pembangunan PLTS itu," imbuhnya.

"Harapan kami dengan adanya program ini, untuk memenuhi amanah undang-undang bahwa masyarakat ini untuk layanan dasar harus terpenuhi seperti di pendidikan, kesehatan, air bersih termasuk listrik ini adalah layanan dasar. Dan harapannya di Kukar bisa terpenuhi. Sehingga tidak ada lagi Kukar yang tidak bisa menikmati listrik 24 jam," pungkas Arianto.

Penulis : Ady Wahyud
Editor : Nicha Ratnasari



Ilustrasi proses pemadaman kebakaran (Istimewa)

DISDAMKARMATAN KUKAR BAKAL PUNYA FIREBOAT, TANGANI KEBAKARAN DI WILAYAH PERAIRAN

TENGGARONG - Musibah kebakaran, masih menjadi momok menakutkan bagi masyarakat, khususnya di Kutai Kartanegara (Kukar). Selain bisa terjadi kapan saja, kebakaran juga dapat dengan cepat menghancurkan seisi rumah hingga rata dengan tanah.

Kebakaran merupakan peristiwa yang memerlukan penanganan cepat. Namun keterbatasan armada masih menjadi permasalahan paling fundamental yang dihadapi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmatan) Kukar.

Tak heran permasalahan ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar, di bawah kepemimpinan Edi Damansyah - Rendi Solihin.

Apalagi Kukar dikenal dengan kondisi geografis yang sangat unik. Selain wilayah yang terkenal luas, beberapa wilayah juga tidak memiliki akses jalan darat dan terletak di bantaran sungai.

Hal itulah yang membuat Pemkab Kukar mengalokasikan anggaran khusus untuk memperkuat peralatan dan kelengkapan petugas pemadam kebakaran. Pada anggaran per-

bahan, Pemkab Kukar telah menganggarkan untuk peremajaan alat dan pengadaan unit fireboat (kapal pemadam kebakaran).

"Betul, ini merupakan kebijakan dari Pak Bupati dan Pak Wakil, untuk memperkuat armada kita di beberapa kecamatan, terutama di wilayah yang masyarakatnya tinggal di bantaran sungai. Ada sekitar delapan unit perahu pemadam yang akan kita sediakan," terang Kepala Dinas Damkarmatan Kukar, Fida Hurasan, Jumat (8/9/2023).

Selain pengadaan fireboat, pihaknya juga menganggarkan untuk peremajaan unit mobil pemadam, beserta kelengkapan lainnya. Hal ini dilakukan mengingat banyak peralatan yang sudah termakan usia.

"Kami sering mendapatkan keluhan dari petugas di lapangan, di mana dalam sebulan unit-unit bisa rusak dua sampai tiga kali. Maka dari itu kita juga anggar untuk peremajaan," tambahnya.

Pria yang akrab disapa Afe ini menerangkan, nantinya peralatan lama akan tetap dimanfaatkan sebagai persiapan pembentukan pos pemadam baru di

beberapa kecamatan. Mengingat sejauh ini Disdamkarmatan Kukar baru memiliki delapan pos pemadam yang membackup 20 kecamatan.

"Nah, untuk unit dan alat lama, kita akan geser untuk persiapan pembentukan pos baru. Unit yang lama nantinya kita service dulu," sambung Fida.

Selain itu, Fida mengaku pihaknya tengah melakukan inventarisasi terhadap keberadaan relawan pemadam kebakaran di setiap desa maupun kecamatan.

Baginya keberadaan relawan pemadam sangat dibutuhkan dan membantu dalam penanganan awal jika terjadi musibah kebakaran. Nantinya relawan yang ada akan dilengkapi dengan mesin portable, lengkap dengan peralatan pemadam kebakaran.

"Sekarang kita cari dulu relawannya, jangan sampai sudah ada alatnya, tapi tidak ada yang bisa menggunakan. Keberadaan relawan ini untuk penanganan awal sambil menunggu petugas datang, karena wilayah Kukar kan luas, makanya kita butuh bantuan masyarakat," tutupnya.

**Penulis : Ady Wahyud
Editor : Nicha Ratnasari**



SIAPKAN SDM UNGGUL BERKOMPETEN



BACA HALAMAN A2



Wujudkan Visi, Perlahan Wilayah Pesisir Bakal Diubah Jadi Objek Wisata

BACA HALAMAN A3

Siapkan SDM Unggul Berkompeten

Pupuk Kaltim Kembali Gelar Program Vokasi Industri dan Magang Bersertifikat

BONTANG - PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) kembali menggelar dua program pendidikan dalam mendorong peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di Indonesia. Di antaranya program Pendidikan Vokasi Industri setara Diploma 1 dan Diploma 3, serta Magang Studi Independen Bersertifikat (MISB) Kampus Merdeka. Program yang diikuti puluhan peserta dari berbagai wilayah Indonesia ini dilaksanakan secara serentak, dimulai Senin (4/9/2023).

Direktur Operasi & Produksi Pupuk Kaltim Hanggara Patrianta, mengungkapkan program vokasi industri setara Diploma 1 dan 3 ditujukan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang andal dan terampil sesuai kebutuhan industri, khususnya pengembangan kompetensi generasi muda di kawasan timur Indonesia.

Program ini selaras dengan semangat Pupuk Kaltim dalam mendukung penguatan pendidikan vokasi di Indonesia, yang diimplementasikan melalui pengembangan kapasitas masyarakat agar siap masuk dunia kerja.

Pada program ini Pupuk Kaltim bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSD-MI) Kementerian Perindustrian (Kemen-

perin), melalui Politeknik ATI Makassar untuk jenjang setara Diploma 1 dan Politeknik Industri Petrokimia Banten untuk jenjang Diploma 3.

"Pengembangan program pendidikan vokasi sekaligus upaya Pupuk Kaltim mendukung transformasi bisnis perusahaan dalam menghadapi era Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity (VUCA)," ujar Hanggara.

Dijelaskannya, jenjang setara Diploma 1 akan ditempuh selama dua semester dengan program studi Teknik Pengelasan, sedangkan setara Diploma 3 berlangsung enam semester pada program studi Teknologi Proses Industri Petrokimia.

Para peserta yang mendapat kesempatan tahun ini sebanyak 60 orang, masing-masing 30 peserta untuk tiap jenjang pendidikan. Seluruhnya berasal dari berbagai wilayah timur Indonesia, yakni Bontang, Fakfak Papua Barat, Ternate dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Pendidikan vokasi dilaksanakan dengan komposisi materi link and match sesuai kebutuhan industri. Para peserta akan dibekali teori hingga praktik dunia industri di Pupuk Kaltim, utamanya bidang instalasi dan perbaikan peralatan kelistrikan, serta proses pengelasan peralatan pabrik," terang Hanggara.

Selain memperoleh ijazah setara Diploma 1 dan 3, seluruh peserta yang dinyatakan kompeten juga akan mendapatkan sertifikat profesi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), berdasarkan hasil uji kompetensi sesuai bidang ilmu.

"Disamping itu seluruh peserta juga akan menerima Sertifikat Praktik Kerja Industri (Prakerin) dari Pupuk Kaltim, sebagai bentuk pengakuan telah mengikuti pendidikan selama waktu yang ditentukan sesuai program studi masing-masing," lanjut Hanggara.

Sementara untuk program MSIB Kampus Merdeka yang tahun ini telah memasuki batch kelima, Pupuk Kaltim menerima 32 peserta yang terdiri dari mahasiswa berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Seluruhnya disaring berdasarkan sistem seleksi, dari total 1.308 pendaftar.

Program MSIB berlangsung mulai Agustus hingga Desember 2023, dengan metode pelaksanaan kegiatan berbasis project. Dimana para mahasiswa dituntut melakukan manajemen waktu untuk mengimplementasikan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan, agar project yang disiapkan selama program bisa selesai tepat waktu.

"Para peserta akan ditempatkan di berbagai unit kerja Pupuk Kaltim, untuk



Lanjutan Utama



menyelesaikan total 21 project yang telah disiapkan bersama profesional mentor dari karyawan perusahaan," lanjut Hanggara.

Program MSIB merupakan kolaborasi Pupuk Kaltim dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek), sebagai bentuk kepedulian dan komitmen perusahaan dalam meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia di Indonesia.

Terlebih di era yang kian kompetitif, sumber daya manusia adaptif dan terampil sangat dibutuhkan, dengan penguasaan soft skills yang didukung

kompetensi mumpuni pada spesifikasi bidang tertentu.

Hal ini menjadi perhatian Pupuk Kaltim, dimana mahasiswa yang masih duduk di bangku perkuliahan perlu mulai memperlengkapi diri dengan kemampuan relevan, sebagai syarat untuk menjadi SDM unggul yang mampu menjawab tantangan global.

"Maka dari itu MSIB menantang mahasiswa Indonesia untuk dapat berinovasi, berkreasi serta berkolaborasi dengan berbagai pihak, sehingga bisa menjadi pribadi yang mandiri dan unggul di berbagai sektor," tutur Hanggara.

Dirinya pun berpesan agar seluruh peserta dari dua program tersebut dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, untuk menimba pengetahuan sekaligus pengalaman dunia industri sebagai bekal kompetensi diri guna meningkatkan daya saing dalam menghadapi pasar kerja kedepan.

"Manfaatkan kesempatan ini untuk belajar berbagai ilmu dan kemampuan sesuai bidang yang dimiliki. Semoga seluruh peserta nantinya dapat meningkatkan inovasi maupun keterampilan selama menjalani pendidikan," pungkas Hanggara. (adv)



**DPRD KOTA BONTANG****DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Junaidi

Andi Faizal S Hasdam

Agus Haris SH

Yessy Waspo

WAKIL KETUA

KETUA DPRD

WAKIL KETUA

SEKRETARIS DPRD



IST

Kampung Malahing harus terus dirawat agar nuansa wisata tetap terjaga.

Malahing Juara III Nasional, Andi Faiz: Jangan Berhenti Merawat, Tingkatkan Saprass!

BONTANG – Perhatian kepada Kampung Malahing harus terus dilakukan. Jangan sampai berhenti pasca menorehkan prestasi juara 3 nasional. Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Senin (4/9/2023).

Diketahui, Malahing baru saja meraih Juara III Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) Tahun 2023 kategori desa wisata maju dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI.

Dengan raihan prestasi tersebut, Andi Faiz berharap kepada Pemkot Bontang dan para stakeholder agar tidak ber-

henti mengucurkan perhatiannya kepada warga Malahing. Justru dengan prestasi itu harus semakin memicu untuk meningkatkan sarana prasarana di sana.

"Saya kira sangat gampang untuk mengejar target sebagai salahsatu nominasi desa wisata terbaik. Namun PR nya kita sekarang justru bagaimana merawat Malahing ke depan. Jangan sampai setelah dapat penghargaan ini putus sudah perhatian kita kepada Malahing," ungkapnya kepada awak media.

Politisi Partai Golkar itu takut, kalau perhatian sudah putus ke kampung di

atas air itu, orang-orang akan kapok datang lagi ke Malahing. Lantaran tidak ada lagi nilai lebih yang bisa dilihat dari Malahing.

"Takutnya setelah juara kalau saprassnya gak diperhatikan, pengunjung sudah jera datang lagi. Padahal mindset awalnya orang-orang tau kalau Malahing itu indah, juara nasional. Malah kapok datang lagi karena semua keindahan itu makin memudar," bebarnya.

"Saya harap dengan prestasi ini bisa lebih memacu pemkot dan stakeholder yang ada, untuk meningkatkan seluruh saprass masyarakat yang lebih baik lagi di sana," pungkasnya. (al/adv)



IST

Kampung Tihi-tihi salahsatu kampung di wilayah pesisir Bontang.

Wujudkan Visi, Perlahan Wilayah Pesisir Bakal Diubah Jadi Objek Wisata

BONTANG – Seluruh wilayah pesisir Bontang memiliki potensi wisata, karenanya Pemkot Bontang harus mengelolanya dengan baik agar wujudkan visinya menjadikan Bontang sebagai kota wisata ke depannya. Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Bontang, Andi Faisal Sofyan Hasdam usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Senin (4/9/2023) lalu.

Menurutnya, wilayah pesisir Bontang tak hanya Malahing saja yang berpotensi wisata, namun kampung-kampung di atas air lainnya pun juga punya potensi yang sama. Tinggal bagaimana pemkot bisa melihat berbagai macam keunggulan di mas-

ing-masing kampung tersebut.

“Setiap kampung punya keunggulan produk yang memiliki ciri khas daerahnya masing-masing, itu harus dimaksimalkan. Sehingga kalau ada yang datang ke masing-masing kampung itu, akan mendapatkan kearifan lokalnya,” ujarnya kepada awak media.

Dikatakannya, pemkot sudah tepat dengan visinya menjadikan Bontang sebagai kota wisata. Saat ini perlahan visi tersebut mulai diwujudkan. Setelah berhasilnya Malahing juara III nasional ADWI tahun 2023 dari Kemenparekraf RI, sekarang pemkot melalui Dispopar berencana mengubah Pulau Gusung

menjadi objek wisata.

Namun ditambahkannya, semua itu perlu proses. Tidak bisa ujug-ujug terwujud. Saat ini Pemkot Bontang masih dalam tahap perencanaan untuk mengubah wilayah pesisir menjadi objek wisata.

“Kemarin Dispopar sudah buat perencanaannya. Di anggaran murni tahun depan kita lihat berapa yang bakal diajukan. Tentu bertahap lah kita perbaiki sapsrasnya. Karena tidak mungkin semua APBD itu kita fokuskan hanya untuk ke pesisir. Kita juga perlu untuk kesejahteraan masyarakat yang lain,” pungkasnya. (al/adv)

Vaksinasi HPV Digalakkan, Cukupkah Lindungi Generasi Masa Depan?



Oleh:

Fitri Mulyani, Amd

Ibu Rumah Tangga dan Pemerhati Sosial

LEBIH baik mencegah daripada mengobati. Seringkali kita mendengar slogan itu. Mencegah jauh lebih murah, tidak perlu keluar banyak biaya, tidak kehilangan waktu produktif, tidak merasa sakit, sedih dan khawatir.

Data dari laman web kementerian kesehatan, diketahui bahwa Kanker Serviks menempati urutan kedua dengan jumlah 36.633 kasus atau 9,2% dari total kasus kanker di Indonesia. (22/7/2022)

Seperti diberitakan Radar Bontang.com bertajuk "Cegah Kanker Serviks, Siswi Kelas 5 SD Mulai Divaksin HPV," Launching pelaksanaan vaksinasi Human Papiloma Virus (HPV) dan imunisasi rotavirus bagi bayi dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) di Aula Dispopar, Selasa (15/8/23).

Penerima vaksinasi HPV ditargetkan bagi anak perempuan yang duduk di kelas 5 SD. Total jumlah pelajar perempuan kelas 5 SD itu sebanyak 1300 siswa. Sementara itu, ketersediaan tahap awal di Bontang masih berkisar 670 buah vaksin.

Sedangkan imunisasi rotavirus diberikan kepada bayi usia 2 hingga 4 bulan. Di Bontang sendiri terdapat sekira 3 ribu bayi, namun imunisasi yang masuk baru seribu.

Adi Permana, Pengendalian Penyakit Ahli Muda

Epidemiologi Dinkes Bontang, menjelaskan, vaksinasi HPV ini diperuntukkan mencegah perempuan terkena kanker serviks. Sementara imunisasi rotavirus untuk mencegah diare pada bayi.

Pemegang program kanker Dinkes Bontang, Irma menjelaskan kalau ada warga Bontang yang terkena kanker serviks stadium 1 dan 2 masih bisa datang ke puskesmas untuk melakukan Cryoterapi Serviks di Puskesmas Bontang Selatan 1, Puskesmas Bontang Utara 1, dan Puskesmas Bontang Utara 2. Dikatakan untuk pengobatannya bisa pakai BPJS, tapi kalau sudah kanker stadium 3 dan 4 sudah tidak bisa, harus kemoterapi.

Risiko Kanker Serviks Akibat Seks Bebas

Bahaya seks bebas bisa meningkatkan risiko kanker serviks di kemudian hari. Infeksi oleh human papillomavirus (HPV) adalah faktor risiko utama kanker serviks. Virus ini dapat menginfeksi sel-sel pada permukaan kulit, serta sel-sel yang melapisi alat kelamin, anus, mulut, dan tenggorokan. Human papillomavirus menular melalui aktivitas seksual, termasuk seks vaginal, anal, dan bahkan oral.

Namun sayangnya perhatian pemerintah tidak bertumpu pada pencegahan seks bebas termasuk aktivitas seksual menyimpang yang nyatanya menjadi penyumbang terbesar meningkatnya resiko kanker serviks. Pandangan hidup sekuler liberal telah mempengaruhi kehidupan masyarakat yang bebas tanpa batas. Selama ada hasrat, suka sama suka, dan tidak ada aduan, maka perzinahan bebas dilakukan.

Seolah membuang-buang anggaran untuk vaksin kanker serviks ini, solusi tidak sampai ke akar masalah. Karena sistem kehidupan sekuler liberal inilah yang menjadi biangnya. Mencegahnya dengan vaksin HPV tentu tidak salah sebagai salah satu langkah, namun itu tidak cukup.

Jangan sampai bidang kesehatan digenjot terus untuk mengatasi penyakit, namun mengabaikan akar persoalannya. Pandangan hidup yang salah, penyimpangan seksual, pergaulan bebas butuh untuk diatasi bahkan dihilangkan untuk memutus faktor risiko kanker serviks ini. Mengingat pembiayaan kesehatan hari ini melalui BPJS menjadi makin rumit dan banyak penyakit yang tidak bisa di tanggung. Alhasil biaya kesehatan akan menjadi makin mahal.

Cara Islam Menangani Penyakit Kanker Serviks

Prinsip layanan kesehatan dalam Islam ada tiga, di antaranya: Pertama, negara menjamin layanan kesehatan bagi seluruh rakyat tanpa pandang bulu.

Kedua, biaya layanan kesehatan juga ditanggung negara. Negara wajib mengelola harta milik rakyat

Lanjutan Catatan

berupa sumber daya alam dari hulu ke hilir. Negara harus mengambil peran dalam pengelolaan SDA dengan amanah dan profesional, kemudian hasilnya didistribusikan kepada rakyat, salah satunya berupa layanan kesehatan.

Ketiga, administrasi pelayanan kesehatan mudah, cepat, profesional, dan amanah. Penanganan pasien harus diutamakan apalagi yang sangat darurat. Tidak ada alasan menunggu keluarga pasien atau menunggu penyelesaian administrasi terlebih dahulu.

Islam juga memiliki aturan syariat yang dapat mencegah penyakit kanker serviks dan penyakit kelamin lainnya. Dengan pilar pelaksananya individu, masyarakat dan negara.

Islam memerintahkan individu muslim menghiasi dirinya dengan ketakwaan (QS al-Ahzab[33]: 70). Menurut Syekh Taqiyuddin an Nabhani dalam kitabnya an Nizham al ijtimai'iy fii al Islam, tatkala seorang muslim memiliki sifat takwa, pasti ia akan takut kepada Allah SWT, akan mendambakan surga-Nya, sekaligus sangat ingin meraih keridaan-Nya. Sehingga memalingkannya dari perbuatan mungkar dan akan menghalanginya dari kemaksiatan kepada Allah SWT seperti berzina.

Selanjutnya, masyarakat wajib memelihara peraturan Islam tersebut dengan mempelajari dan mengajarkan ke anggota masyarakat lainnya, serta beramar makruf nahi mungkar. Amar makruf nahi mungkar kepada pemerintah adalah dengan cara mengoreksinya apabila lengah tidak menetapkan dan melaksanakan peraturan sesuai ketetapan syariat Islam.

Masyarakat juga senantiasa beramar makruf nahi mungkar sesama anggota masyarakat. Kewajiban amar makruf nahi mungkar ini sesuai firman Allah Ta'ala, yang artinya: "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung." (QS Ali Imran: 104)

Kemudian tugas dan tanggung jawab negara yang ditetapkan Islam.

1) Negara wajib menyelenggarakan pendidikan berbasis akidah Islam dan

mengajarkan pengetahuan hukum syariat kepada peserta didik. Sistem pendidikan berbasis akidah ini akan melahirkan individu yang kuat imannya, penuh ketakwaan pada Allah SWT, dan sungguh-sungguh dalam beramal ketaatan.

2) Negara wajib menerapkan sistem pergaulan Islam. Yakni yang akan memperlakukan ketentuan syariat dalam interaksi di masyarakat. Seperti kewajiban menutup aurat, larangan khalwat, larangan ikhtilat tanpa hajat syar'i, dll. Negara juga wajib menyediakan Qadli hisbah yang akan bertugas di tempat-tempat umum untuk memastikan tidak adanya pelanggaran hukum. Jika ada kasus pelanggaran, maka petugas ini akan segera menyampaikan sanksi sesuai ketentuan hukum syara'.

3) Negara wajib menjamin kesejahteraan rakyatnya.

Di antaranya memastikan kepala keluarga memiliki pekerjaan layak untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya. Dalam kondisi ini, para ibu tidak akan dituntut ikut bekerja. Mereka akan memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan peran utama sebagai ibu pendidik anak-anaknya. Juga akan hadir mendampingi dan menjaga mereka dari setiap ancaman bahaya.

Negara wajib memastikan tidak adanya konten-konten media yang merusak akidah dan merusak akhlak masyarakat. Seperti kemusyrikan, sepilis (sekularisme, pluralisme, dan liberalisme), juga pornografi dan pornoaksi. Negara pun akan bertindak cepat memberi sanksi pada siapa pun yang melanggar.

4) Negara menerapkan sanksi tegas sesuai ketentuan syariat terhadap pelaku maksiat.

Pelanggaran berupa zina akan dikenakan sanksi rajam bagi pelaku yang sudah pernah menikah, dicambuk dan diasingkan untuk pelaku yang belum pernah menikah. Pembuat dan penyebar konten-konten porno akan diberikan sanksi ta'zir yang jenisnya ditentukan berdasarkan pendapat Khalifah.

Itulah gambaran penerapan Islam kaffah yang mampu melindungi dan menyelamatkan generasi dari gaul bebas dan penyakit kelamin termasuk kanker serviks.



SYAKURAH/RADAR BONTANG

Pelantikan anak cabang dan cabang ranting PPTI

PPTI Ranting Dilantik, Siap Bantu Tangani TBC

BONTANG - Pelantikan anak cabang dan cabang ranting Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) yang merupakan mitra dari puskesmas untuk membantu penanggulangan TBC di tingkat kelurahan dan kecamatan, dilaksanakan Jumat (8/9/23) di Auditorium 3 Dimensi.

Penanggulangan TBC mengutamakan aspek promotif dan pencegahan, tanpa mengabaikan aspek pengobatan dan grafitatif yang bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, serta kematian. Ini untuk menurunkan dan mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang timbul akibat tuberkulosis.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Bontang, sekaligus langkah untuk penurunan kasus dengan mengunjungi lapas, pesantren, dan daerah-daerah yang sulit dijangkau. Bekerjasama dengan PPTI juga melakukan pengecekan ke wilayah pesisir seperti Gusung, Malahing dan Tihi-tihi.

"Pelayanan Tuberkulosis termasuk dalam standar pelayanan minimal, yang artinya cakupannya harus 100 persen," ujar Muhammad Ramsi, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Diketahui pada tahun 2022 lalu, kasus TBC di Bontang mencapai 716 kasus, termasuk TBC anak. Kemudian pada tahun 2023 hingga bulan September ini sudah ada 504 kasus. Untuk terduga TBC

sebanyak 4.806. Di sinilah peran PPTI Bontang menjangkau mereka dengan layanan yang sudah disediakan.

Indikasi terduga TBC adalah orang yang pernah kontak dengan mereka yang sudah terkena TBC, untuk melakukan konsultasi bisa dilakukan di puskesmas serta rumah sakit dan ditanggung oleh BPJS.

"Kasus-kasus di Bontang ini adalah kasus yang masih dalam pengobatan, karena pengobatan kurang lebih membutuhkan waktu selama 6 bulan," jelasnya.

Ketua PPTI Kota Bontang, Hapidah menjelaskan, hal ini berguna untuk menaikkan derajat kesehatan di Bontang.

"Semoga teman-teman yang dilantik hari ini benar-benar bisa membantu pemerintah dalam penemuan kasus, agar cepat diobati," ungkapnya.

Penyuluhan hingga merujuk pasien terduga TBC dan memberikan pendampingan pasien yang diobati, agar dapat menjalani pengobatan sampai sembuh. Selain itu juga berupaya memfasilitasi santunan bagi pasien TBC yang kurang mampu sesuai dengan kemampuan organisasi.

"Dari 504 kasus di Kota Bontang terdapat 5 kelurahan tertinggi, yaitu Loktuan, Gunung. Elai, Berbas Tengah, Bontang Kuala dan, Tanjung Laut," jelasnya.

Penulis: Syakurah

Editor: Yusva Alam



IST

Perselesihan dua IRT di Berbas Tengah berhasil diselesaikan dengan jalan kekeluargaan.

Tuduh Tetangga Ambil Kalung Anak, Dua IRT di Berbas Tengah Berseteru

BONTANG – Terjadi perselisihan antara dua ibu rumah tangga di daerah Berbas Tengah. Bahkan perseteruan itu hingga ke ranah dunia maya. Namun pihak kepolisian berhasil menyelesaikan perkara tersebut.

Kapolres Bontang, AKBP Yusep Dwi Prasetya melalui Bhabinkamtibmas Berbas Tengah Aiptu Rudiantoro menuturkan, kejadian berawal seorang wanita berinisial JT menuduh tetangganya SR mengambil kalung milik anaknya seberat 2 gram di Jalan WR Soepratman, Berbas Pantai, pada Selasa 5 September 2023 sekira pukul 08.30 wita.

Berdasarkan hal tersebut SR merasa keberatan, karena apa yang dituduhkan

kepadanya tidak disertai dengan bukti, apalagi disebar di medsos.

“Ia keberatan dan melaporkan ke kami,” ungkapnya dikutip dari Polresbontang.com.

“Tapi Alhamdulillah berhasil kita selesaikan dengan kekeluargaan,” jelasnya.

Keduanya pun sepakat berdamai, usai dilakukan mediasi secara kekeluargaan Rabu (6/8/2023) pukul 07.30 wita. Dengan membuat surat kesepakatan untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

“Sudah saling memaafkan, sebetulnya mereka masih ada hubungan kerabat,” pungkasnya.

Editor: Yusva Alam



IST

Petugas damkar berusaha memadamkan api.

Rumah Kontrakan Kosong di Tanjung Laut Terbakar

BONTANG – Kebakaran kembali terjadi di salah satu rumah kontrakan di Jalan KS Tubun, Gang Kol 3, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kamis (7/9/2023) sekira pukul 10.00 wita.

Salah seorang saksi mengungkapkan, awalnya ia melihat kepulan asap keluar dari rumah petakan korban.

"Mulanya saya mencium bau gosong, begitu keluar rumah saya lihat ada kepulan asap di salah satu rumah kontrakan," ungkap saksi mengutip dari Polresbontang.com.

Iapun berteriak kepada warga sekitar dan bersama-sama mendobrak pintu rumah kor-

ban, serta menghubungi Dinas Pemadam kebakaran.

Lebih lanjut saksi mengatakan, saat kebakaran terjadi rumah dalam keadaan kosong.

"Sudah kurang lebih 1 bulan sejak istrinya meninggal, rumah tersebut tidak ditempati. Tetapi barang-barangnya masih ada di dalam," jelasnya.

Sekira 30 menit api berhasil dipadamkan oleh petugas Damkar. Sementara untuk penyebab kebakaran, diduga berasal dari konsleting listrik stop kontak mesin cuci dan kulkas yang terpasang paralel.

Editor: Yusva Alam



SYAKURAH/RADAR BONTANG

Kondisi bangunan bekas bengkel pasca terbakar.

Bangunan Bekas Bengkel di Perempatan RSUD Terbakar

BONTANG - Telah terjadi kebakaran di Jalan Letjen S. Parman, tepatnya dekat dengan Simpang Empat RSUD Taman Husada, Jumat (8/9/23) sore.

Kebakaran terjadi sekira pukul 16.15 wita. Api membakar salah satu bangunan yang menurut keterangan dari Amiluddin, Kepala Disdamkarta Bontang adalah sebuah bengkel yang sudah lama tidak beroperasi.

"Dari yang dilihat di TKP terdapat banyak drum yang berisi oli bekas, dan juga ada solar dan bahan-bahan lainnya, jadi ini bekas bengkel," ujarnya.

Saat pemadam tiba di lokasi api sudah membesar dan berhasil dipadamkan. Disdamkarta menurunkan 3 unit supply, 2 unit fire dan 1 unit rescue.

Di dalam bengkel tersebut terdapat rumah yang

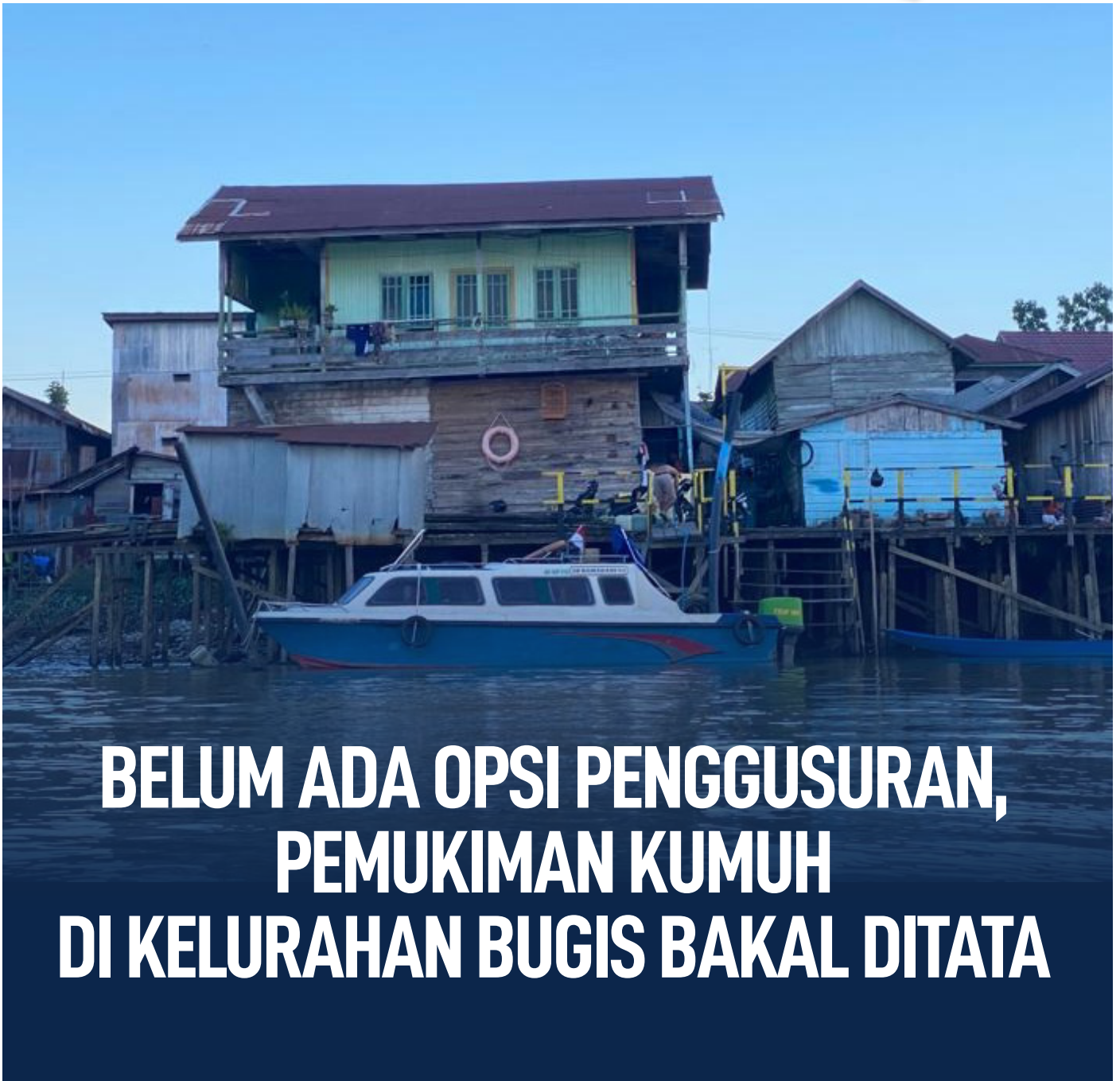
berjarak beberapa meter dari bangunan yang terbakar, namun masih satu lahan dan ditempati oleh adik pemilik bekas bengkel tersebut bernama Imne.

Diceritakan Imne, awalnya ia mendengar suara ledakan. Merasa tidak wajar, Imne pun mengecek keluar rumah.

"Pas keluar rumah sudah terbakar. Di dalam situ memang banyak oli bekas, dan masih ada aliran listrik juga, tapi belum tahu pasti penyebabnya api," jelasnya.

Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, namun api hampir melahap warung makan yang terdapat persis di samping bangunan tersebut.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam



BELUM ADA OPSI PENGGUSURAN, PEMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN BUGIS BAKAL DITATA



**DUA KELOMPOK TANI DI BERAU
TERIMA HIBAH 70 EKOR KAMBING**



Sebanyak 70 ekor kambing diberikan kepada kelompok tani di Kampung Samburakat dan Sembakungan.

Dua Kelompok Tani di Berau Terima Hibah 70 Ekor Kambing

TANJUNG REDEB - Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Berau memberikan bantuan hibah sebanyak 70 ekor kambing kepada kelompok tani di Kampung Samburakat dan Sembakungan Kecamatan Gunung Tabur.

Kabid Peternakan Distanak Berau, Eko Wahyu mengatakan, penyaluran hibah kambing tersebut telah dilakukan pada akhir Agustus lalu. Tujuannya untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Serta memberdayakan potensi di masyarakat.

"Sebelumnya kambing telah dilakukan pengukuran, penandaan dan pemeriksaan kesehatan terlebih dulu," jelasnya, Jumat (8/9/2023).

Lanjutnya, kambing-kambing tersebut juga telah dikarantina selama dua minggu. Kemudian baru disalurkan kepada masing-masing kelompok.

"Ternak diistirahatkan di kandang penampungan dulu sementara selama 2 minggu," katanya.

Masing-masing kelompok menerima 35 ekor kambing yang terdiri dari 5 ekor jantan dan 30 ekor betina.

Adapun kandang kambing yang berada di Samburakat mampu menampung hingga 100 ekor kambing. Menurutnya kandang di sana cukup bersih. Rencana pemeliharaan ternak juga akan dijadikan dalam satu kandang.

"Kemudian tim melakukan pengecekan ulang pada ternak yang diterima setelah itu baru diserahkan kepada kelompok. Dengan disaksikan kepala kampung setempat," ungkapnya.

Setelah sampai di kandang, ternak tersebut juga langsung diberikan makan supaya kondisinya cepat pulih dan segar setelah menempuh perjalanan hingga kampung yang dituju.

Pihaknya juga memberikan sedikit arahan terkait pemeliharaan ternak yang baik dan benar kepada para peternak. (mnz/dez)

Pewarta: Amnil Izza

Editor: Dezwan



Kondisi belakang rumah pemukiman kumuh di bantaran Sungai Kelay Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb.

BELUM ADA OPSI PENGGUSURAN, PEMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN BUGIS BAKAL DITATA

TANJUNG REDEB - Pemukiman kumuh di bantaran Sungai Kelay Kelurahan Bugis bakal dirapikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau. Agar terlihat lebih rapi apalagi, banyak dilewati wisatawan yang berangkat dari Dermaga Sanggam.

Wakil Bupati Berau Gamalis meninjau langsung pemukiman tersebut pada Jumat (8/9/2023) sore. Dengan menyusuri Sungai Kelay sepanjang 1 km yang terdiri dari 4 RT yang terdiri dari sekitar 1.000 Kartu Keluarga (KK). didampingi instansi terkait dan rombongan. Di mana sebelumnya mereka telah mengadakan rapat internal sebelum menyusuri sungai.

"Kami mencoba untuk menyamakan mata terkait dengan bantaran Sungai Kelay yang hari ini sudah kita susuri itu terlihat sangat memprihatikan. Bahkan dari sisi estetika sudah lepas," terangnya, Jumat (8/9/2023).

Terlebih Kabupaten Berau dicanangkan sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dan penataan tersebut tidak bisa dipisahkan dari keindahan tata kota. Tentunya harus ditangani secara baik dan rapi yang memiliki nilai estetika.

Saat ini baru direncanakan untuk penanganan jangka pendeknya. Yakni dengan merapikan pemukiman tersebut agar tidak terlihat kumuh.

"Mungkin saja nanti akan dicat warna warni. Mungkin nanti akan di cat warna warni, bisa dengan graffiti ataupun dengan keindahan yang lain. Kita sesuaikan dengan desain yang akan dibuat," katanya.

Pihaknya juga telah menyiapkan perencanaan jangka panjang. Lanjutan waktu yang tidak cukup hingga akhir tahun hanya bisa dilakukan penanganan jangka pendek.

Pun belum akan dilakukan pengusuran sebab hal itu harus diperhitungkan matang-matang. Serta harus siap dengan dampak sosial ekonomi yang akan ditimbulkan. Selanjutnya, jelas akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat setelah desain yang disusun selesai dan dipublikasikan.

"Kalau kita bicara jangka panjang waktu kita tidak akan cukup, dan kalau dilakukan pengusuran kita harus perhitungkan dengan baik dan harus memikirkan dampak sosialnya," paparnya.

Gamalis menilai sisi bantaran Sungai Kelay sebelahnya yakni di Kelurahan Sambaliung sudah bagus. Jika ada yang perlu dibenahi bisa saja akan dilakukan pengecatan ulang titik per titik.

Terkait sumber dana rencananya akan diusahakan dengan bantuan pihak ketiga melalui dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Pihaknya belum dapat memastikan apakah dapat menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Ditakutkan berbenturan dengan aturan yang berlaku.

"Tapi kalau tidak diperbolehkan, kita akan usahakan dengan bantuan pihak ketiga. Saat ini kami fokus memikirkan penanganan jangka pendeknya," pungkasnya.

Sementara, Lurah Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb, Muham-

mad Hidayat menyampaikan, pihaknya tentu menyambut terkait penanganan kawasan pemukiman di lingkungannya.

Pihaknya juga mengakui bahwa rumah-rumah warga di sana memang terlihat kumuh dan akan mengurangi daya tarik wisata di Berau khususnya di Kelurahan Bugis.

"Karena wisatawan kita kalau berwisata ke pesisir pantai dan melalui Dermaga Sanggam pasti melewati pinggir sungai ini. Jangan sampai salah fokus ke kondisi rumah warga yang kumuh dan tidak terawat," ucapnya.

Dijelaskannya, pemukiman di bantaran Sungai Kelay tersebut terbangun sudah sejak tahun 1980an. Berkembang hingga tahun ini KK di sana mencapai sekitar 1.000 KK.

"Sebenarnya sejak 2019 lalu sudah ada perencanaan untuk penataan kawasan tapi dialihkan untuk pandemi Covid-19. Kalau dilaksanakan pasti sudah bagus dan tertata sekarang," tuturnya.

Hidayat berharap, rencana jangka panjang yang disampaikan Pemkab Berau bisa segera terealisasi tahun ini. Meskipun memang baru jangka pendek. Pihaknya sangat berharap pihak ketiga dapat membantu penanganan tersebut.

"Kami juga ada dana RT yang diberikan Pemkab Berau Rp 50 juta per tahun. Tapi kami juga tidak berani menggunakan dana tersebut karena takut terbentur regulasi," terangnya. (mnz/dez)

Pewarta: Amnil Izza
Editor: Dezwan



Stok beras di Bulog Berau sebanyak 300 ton hingga awal tahun depan.

SEJAK APRIL, HARGA BERAS DI BERAU NAIK TAPI STOK AMAN

TANJUNG REDEB - Harga beras di Kabupaten Berau naik sejak April lalu. Hingga sekarang masih stabil di harga yang sama. Namun, itu tidak memengaruhi stok beras yang ada, termasuk distribusinya selama ini.

Hal itu dipaparkan oleh Kepala Dinas Pangan Berau, Rakhmadi Pasarakan. Dijelaskannya, harga beras premium naik dari Rp 15.200 per kg menjadi Rp 16.000 per kg. Sementara, harga beras medium naik menjadi Rp 15.000 per kg dari sebelumnya Rp 13.300 per kg. Serta beras yang termurah dari Rp 12.000 per kg menjadi Rp 14.000 per kg. Dan sekarang turun lagi menjadi Rp 13.000 per kg.

Memang diakuinya, harga beras secara nasional mengalami kenaikan. Yang disebabkan oleh elnino. Namun, dampak elnino sendiri di Berau tidak menyebabkan harga beras naik. Apalagi konsumsi beras di kampung lebih banyak dari produk sendiri.

"Kami juga membantu pemasaran petani lokal dari hasil

panen Mei lalu. Dan Agustus ini juga ada beras dari Labanan yang baru panen," ungkapnya.

"Kadang petani juga update isu nasional, seperti kenaikan beras ini jadi mereka ada yang menahan stok beras untuk dikeluarkan. Padahal sebenarnya di Berau harga beras tetap stabil sejak April," imbuhnya.

Dibeberkannya stok beras di Berau sudah aman hingga awal tahun depan. Pihaknya dalam hal ini bekerja sama dengan Bulog Berau untuk menyimpan stok beras tersebut. Di mana idealnya stok beras harus mampu memenuhi kebutuhan hingga dua bulan ke depan.

Pihaknya juga terus berupaya menstabilkan harga beras. Salah satunya dengan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk masyarakat yang membutuhkan.

"Alhamdulillah stok beras masih aman sampai awal tahun depan. Kalau sudah kurang dari dua bulan harus memikirkan untuk

stoknya. Beras kalau disimpan terlalu lama juga tidak bagus. Tapi beras ini cepat masuk dan keluar," pungkasnya.

Sementara, Kepala Bulog Berau, Muhammad Mukhlis menyampaikan, hingga Januari 2024 stok beras di gudang Bulog sekitar 300 ton. Serta akan datang 400 ton lagi.

Dirinya juga membeberkan bahwa harga beras di Berau memang umumnya lebih tinggi dari provinsi lain, baik untuk kelas medium maupun premium. Yang dibedakan berdasarkan mereknya.

"Kalau alasan kenaikan beras secara nasional memang disebabkan oleh elnino. Hingga menyebabkan supplier beras di luar negeri menghentikan ekspornya termasuk ke Indonesia," jelasnya.

"Beruntungnya, di Berau Insya Allah stok masih aman dan akan ada 400 ton lagi yang akan datang," tutupnya. (mnz/dez)

Pewarta: Amnil Izza
Editor: Dezwan

KORAN **DIGITAL**

radar.
MEDIA

RADAR BALIKPAPAN

EDISI SABTU
9 SEP 2023

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM



KOMITMEN TURUNKAN EMISI, PLTU TELUK BALIKPAPAN MANFAATKAN 3% BIOMASSA



**PERLAKUAN DISKRIMINATIF
TERHADAP PPPK, LBH SIKAP GUGAT
WALI KOTA BALIKPAPAN DI PTUN**



PLTU PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Kaltim Teluk, Balikpapan. (Rafi'i/Media Kaltim)

TRANSISI ENERGI, UPAYA KURANGI EMISI "JELAJAH ENERGI KALTIM" (4)

KOMITMEN TURUNKAN EMISI, PLTU TELUK BALIKPAPAN MANFAATKAN 3 PERSEN BIOMASSA

BALIKPAPAN - Mengurangi emisi dengan melakukan transisi energi, secara konsisten coba dilakukan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Kaltim Teluk, Balikpapan. Di antaranya memanfaatkan energi biomassa, menjadi salah satu campuran batu bara sebagai bahan bakar Co-Firing.

Asisten Manajer Operasi PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Kaltim Teluk, Balikpapan, Dhidhik K Laksono, menjelaskan, PLTU yang memiliki kapasitas 2x110 Mega Watt (MW) ini menargetkan penggunaan Co-Firing dari energi biomassa sebanyak 3 persen. Setidaknya hingga akhir tahun 2023 ini. Dengan pemenuhan sementara dari dua supplier yang sudah berkontrak. Yakni 400 ton energi biomassa dari PT Teluk Borneo Nusantara (suplai dari TPAS Manggar) dan

850 ton energi biomassa dari PT AW Technology (suplai woodchip dari sekitar Balikpapan).

"Dengan kami melakukan survey dan terus berkomunikasi dengan supplier kita, target (3 persen) akhir tahun akan tercapai, optimis tercapai," ujar Dhidhik pada mediakaltim.com.

Prosesnya sendiri, energi biomassa yang disuplai ke PT PLN Nusantara Teluk Balikpapan, akan dikumpulkan dan dicam-

pur dengan batu bara murni. Dengan perbandingan 3 persen energi biomassa dan 97 persen batu bara. Diaduk dan dicampur dan dikirim ke bunker untuk dibakar dalam boiler dan menjadi bahan bakar PLTU.

Meskipun ada komitmen 25 persen menggunakan energi biomassa. Tetapi Dhidhik belum berani berandai-andai ataupun memastikan tenggat waktu. Ia memilih untuk berkomitmen memenuhi 3 persen, selanjutnya baru menyusun target 25 persen.

Berdasarkan data yang dipaparkan, Co-Firing PLTU Teluk Balikpapan menggunakan energi biomassa dimulai sejak 8 September 2022. Dengan durasi 4 jam, PLTU menggunakan total batu bara 280 ton dicampur Woodchip sebanyak 14,5 ton, berhasil menghasilkan beban sebesar 100 MW. Dilanjutkan uji coba pada 12 Desember 2022, menggunakan Woodchip, dengan status berhasil. Namun terkendala bahan baku Woodchip yang sulit didapat.

"Keadaannya memang seperti ini, baru bisa memenuhi 3 persen," lanjutnya.

Diketahui, PLTU yang berada di atas lahan 58,8 hektare ini menyuplai 35 persen pemenuhan listrik di Sistem Mahakam dan 17 persen di Sistem Interkoneksi Kalimantan. Dengan

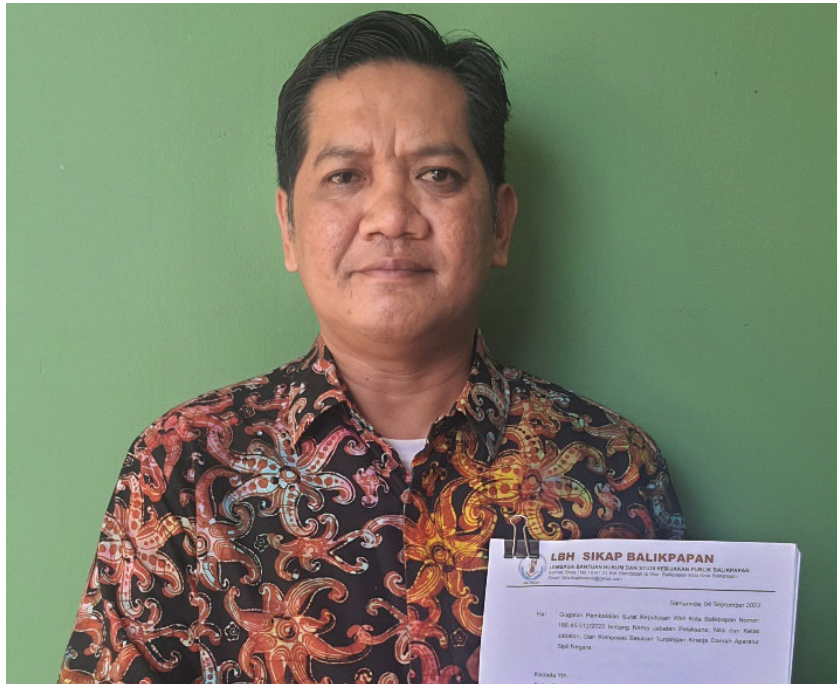
Daya Mampu Netto yang dihasilkan mencapai 1171,53 MW dengan Beban Kaltim 519,10 MW, masih surplus 652,43 MW.

Terpisah, Raditya Wiranegara, analis Senior IESR, menjelaskan penggunaan Co-Firing di PLTU Teluk Balikpapan dengan energi biomassa berupa Woodchip dan Bahan Bakar Jumpatan Padat (BBJP) yang merupakan limbah merupakan langkah mendukung transisi energi ke Energi Baru Terbarukan (EBT). Di mana saat ini sudah mulai memanfaatkan 3 persen energi biomassa hingga akhir tahun ini.

Namun, tantangan utamanya, yakni keberlanjutan suplai energi biomassa menjadi tantangan utama. Perlu ada rencana jangka panjang yang harus dilakukan oleh PLTU Teluk Balikpapan. Sehingga suplai yang ditargetkan bisaxterus terpenuhi.

"Baik itu dengan mengembangkan hutan tanaman energi maupun dengan pemanfaatan limbah lainnya, seperti limbah dari perkebunan sawit. Selain itu, rencana ini juga mesti menargetkan peningkatan rasio co-firing sehingga emisi yang dihasilkan dapat berkurang lebih banyak lagi, tentunya dalam rangka transisi menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan," tutupnya.

Penulis : Muhammad Rafi'i
Editor : Nicha Ratnasari



Ebin Marwi menunjukkan salinan gugatan kepada Wali Kota Balikpapan di PTUN yang telah didaftarkan dengan nomor register perkara 31/G/2023/PTUN.SMD

PERLAKUAN DISKRIMINATIF TERHADAP PPPK, LBH SIKAP GUGAT WALI KOTA BALIKPAPAN DI PTUN

BALIKPAPAN - Lembaga Bantuan Hukum SIKAP (LBH SIKAP) Balikpapan mengambil langkah hukum menggugat Wali Kota Balikpapan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang telah didaftarkan sebagaimana nomor register perkara 31/G/2023/PTUN.SMD.

Gugatan ini terkait dengan perlakuan diskriminatif yang dialami Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota Balikpapan.

PPPK merupakan bagian integral dari Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Narahubung LBH SIKAP Ebin Marwi mengungkapkan, perlakuan berbeda antara PPPK dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) hanya terdapat pada pembatasan masa kerja dan jaminan pensiun. Selain itu, tidak seharusnya ada perlakuan berbeda yang diskriminatif terhadap PPPK.

Dikatakannya, Pemkot Balikpapan,

dalam kurun waktu 2021 hingga 2022, merekrut lebih dari 1.000 PPPK. Namun, para PPPK tersebut merasakan perlakuan berbeda yang tidak adil dari Pemerintah Kota Balikpapan. "Hal ini menciptakan ketidakpuasan dan ketidakpahaman di kalangan PPPK," katanya.

Menurutnya, LBH SIKAP Balikpapan telah mengidentifikasi beberapa modus diskriminatif yang diterapkan oleh Pemkot Balikpapan terhadap PPPK.

Salah satunya adalah pemaknaan berbeda antara PNS dan PPPK yang tidak sesuai dengan Undang-Undang ASN dan peraturan terkait.

Selain itu, PPPK juga tidak diberikan kesempatan untuk dinilai kinerjanya secara objektif, karena mereka tidak memiliki akses ke sistem e-Kinerja seperti PNS. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri PAN-RB 6/2022 yang mengharuskan penilaian objektif kinerja PPPK melalui e-Kinerja.

Puncak dari diskriminasi ini

adalah pengurangan tunjangan kinerja yang signifikan bagi PPPK dibandingkan dengan PNS, meskipun keduanya memiliki fungsi dan tugas yang sama. Ini disebabkan oleh ketidakadanya penilaian kinerja yang objektif. "LBH SIKAP Balikpapan menggugat keputusan Wali Kota Balikpapan terkait tunjangan ini karena dianggap sebagai tindakan diskriminatif yang tidak adil," tegasnya.

LBH SIKAP Balikpapan menekankan pentingnya Pemerintah Kota Balikpapan menghentikan segala bentuk diskriminasi terhadap PPPK dan memperlakukan ASN secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku. "Kami juga meminta Wali Kota Balikpapan untuk mencabut keputusan yang dianggap diskriminatif. Selain itu, kami juga minta Pemkot Balikpapan untuk menerapkan penilaian kinerja objektif kepada semua ASN, termasuk PPPK, sesuai dengan peraturan yang berlaku," pungkaskan mantan Anggota Bawaslu Kaltim ini. **(MK)**

KORAN **DIGITAL**

radar.
MEDIA

RADAR PASER

EDISI SABTU
9 SEP 2023

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM



CAMAT SE KABUPATEN PASER DIMINTA PATROLI KARHUTLA



**41 TAHUN KIDECO :
BERSAMA MEMBANGUN MASA DEPAN**



41 TAHUN KIDECO : BERSAMA MEMBANGUN MASA DEPAN

PASER - Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara. PT. Kideco Jaya Agung (Kideco) memperingati hari jadi ke 41, pada Kamis (7/8/2023), dengan mengusung tema "Bersama Membangun Masa Depan".

Pada peringatan kali ini, anak perusahaan PT Indika Energy Tbk itu, memberikan bantuan kepada pesantren dan panti asuhan di Kabupaten Paser. Pemberian bantuan itu sebagai wujud dari syukur serta kesadaran tumbuh dan besar bersama masyarakat di Kabupaten Paser.

Selain bantuan kepada pesantren dan panti asuhan, Kideco juga menyalurkan bantuan sembako dan menggelar pengobatan gratis terhadap warga prasejahtera dan lansia di 5 Desa lingkaran tambang yakni Desa Muser, Bui, Samurangau, Legai dan Batu Butok di Kecamatan Muar Samu.

Terhadap para orang tua untuk anak-anak berkebutuhan khusus (ABK), Kideco juga mengadakan seminar serta pemberian bantuan berupa perlengkapan permainan edukasi dan tas sekolah di Yayasan Rahmatillah di Kecamatan Tanah Grogot.

Direktur Utama PT Kideco

Jaya Agung, Mohammad Kurnia Ariawan mengatakan, perusahaan tambang harus memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitar area operasinya.

"Kami terus berupaya memastikan kinerja dan kelangsungan perusahaan berjalan dengan baik serta konsisten memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat serta menjamin kelestarian lingkungan," katanya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, bahwa Kideco yang memiliki visi "the most reliable and eco-friendly Indonesian energy provider for sustainable future," selalu menerapkan konsep dan program Environmental, Social and Governance (ESG) dalam bisnis proses operasionalnya.

Selain itu Kideco juga berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi, pendidikan, kesehatan serta infrastruktur di wilayah sekitar lokasi tambang Kideco, di Kabupaten Paser, di bawah program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).

Komitmen itu menurut Kurnia, terbukti dari pencapaian dengan mendapatkan dua kali Program Penilaian Peringkat Kinerja Pe-

rusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper) Emas nasional, pada 2019 dan 2020 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI.

Selain itu Kideco juga meraih peringkat Aditama untuk bidang lingkungan hidup pada ajang Good Mining Practice Award 2022 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta penghargaan Proper Emas dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

"Kideco berkomitmen penuh mendukung program pencapaian net zero emission 2050 dan mendukung upaya pemerintah dalam menurunkan gas emisi rumah kaca di tahun 2030," ungkapnya.

Untuk diketahui, sebelumnya, pada momentum yang sama, Kideco mengadakan lomba cerdas cermat "Kideco Edu Champion" yang diikuti oleh 123 siswa siswa dari 41 sekolah tingkat SMP-SMA se Kabupaten Paser.

"Lomba cerdas cermat ini bertujuan untuk memotivasi siswa-siswi dalam meningkatkan dan mengembangkan kompetensi serta membantu menemukan minat dan bakat mereka," pungkasnya.

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari



Kebakaran hutan dan lahan di Paser (dokumen)

CAMAT SE KABUPATEN PASER DIMINTA PATROLI KARHUTLA

PASER - Para Camat se Kabupaten Paser diminta agar mengintensifkan kegiatan patroli di wilayahnya masing-masing sebagai upaya pencegahan terhadap potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Hal itu berdasarkan imbauan Bupati Paser, Fahmi Fadli melalui Surat Edaran nomor 364/ 1070/Tapem tentang Imbauan Penjagaan Kebakaran Hutan dan Lahan yang ditujukan kepada Camat se Kabupaten Paser, tertanggal 25 Agustus 2023 lalu.

Adapun imbuhan itu merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI nomor 1 tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Karhutla.

"Bupati mengimbau kepada para camat agar melaksanakan kegiatan patroli pencegahan dan penyuluhan, sosialisasi serta kampanye melarang membuka lahan dengan cara membakar," kata Kepala Dinas Padam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Paser, Lukman Dharmas.

Dijelaskan Lukman, dalam surat edaran itu, para camat juga diminta untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi bersama Forum

Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimka) dan perangkat lainnya di wilayah masing-masing.

"Para camat juga diminta menginstruksikan kepada Lurah dan Kepala Desa, untuk menyampaikan ke masyarakat tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana karhutla," tambahnya.

Lukman mengaku, saat ini sudah memasuki musim kemarau. Sehingga Bupati Paser, Fahmi Fadli, kata Lukman, juga meminta para camat melakukan monitoring perkembangan curah hujan hingga pada tingkat kekeringan.

Hal tersebut bertujuan, guna mewaspadaikan puncak musim kemarau dan kondisi lainnya yang dapat menyebabkan terjadinya bencana karhutla. Lukman menambahkan, dalam penanggulangan bencana karhutla, masyarakat hendaknya dilibatkan.

"Untuk berpartisipasi aktif dalam pencegahan bencana karhutla. Jika terjadi kebakaran, segera menghubungi dinas padam kebakaran dan BPBD Kabupaten Paser," tutup Lukman.

Pewarta : Bhakti Sihombin
Editor : Nicha Ratnasari